MATERI SIAGA BENCANA PADA KURIKULUM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI BALI

Luh Ayu Tirtayani & I Nyoman Jampel
Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja
Email: ayu.tirtayani@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan materi siaga bencana pada kurikulum pendidikan anak usia dini. Beberapa tahun terakhir, frekuensi bencana di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup tajam, mulai dari bencana alam sampai dengan bencana ulah manusia. Pasca kejadian tsunami di Aceh tahun 2004 dan gempa bumi Yogyakarta tahun 2006, perhatian pemerintah Indonesia tentang bencana meningkat. Namun demikian, fenomena bencana alam lain seperti gempa, banjir dan angin kencang adalah fenomena yang relatif tetap frekuensinya sepanjang tahun. Situasi demikian telah mendorong pemerintah, berdasarkan himbauan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), untuk melakukan program pengurangan risiko bencana melalui pendidikan bencana yang diimplementasikan di sekolah-sekolah. Ide tentang pendidikan bencana ini adalah menciptakan langkah pertama dalam mempersiapkan budaya dan generasi siaga bencana. Oleh karena itu, penelitian ini hendak menguji sampai sejauh mana kurikulum pendidikan bencana tersebut diimplementasikan pada jenjang pendidikan anak usia dini. Penelitian ini memfokuskan studi atas materi dan kurikulum siaga bencana di Bali. Studi ini dilakukan di tiga kabupaten rawan bencana yaitu Buleleng, Badung, dan Karangasem,yang karakteristik wilayahnya mewakili bencana puting beliung, banjir, dan letusan gunung berapi. Studi ini menganalisis secara deskriptif kurikulum Taman Kanak-kanak (TK) yang ada di lokasi bencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa materi siaga bencana tidak diimplementasikan secara maksimal ke dalam proses pembelajaran. Rendahnya pemahaman guru mengenai karakteristik bencana di daerahnya masing-masing menjadikan minimnya pembelajaran bencana yang mampu dihadirkan di kelas secara kontekstual. Dampaknya, anak-anak didik usia dini tersebut tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai bencana dan reaksi secara tepat terhadap situasi tersebut.

Keywords: siaga bencana, kurikulum PAUD, materi kebencanaan yang kontekstual, bencana di Bali

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu kawasan dalam rangkaian gugus Cincin Api, Indonesia memiliki frekuensi yang tinggi dalam mengalami bencana alam, khususnya bencana letusan gunung berapi dan gempa bumi. Berada dalam zona *ring of fire* membuat Indonesia termasuk kawasan rentan bencana di dunia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2017 menyebukan bahwa bencana letusan gunung berapi, gempa bumi dan longsor adalah jenis bencana yang sering terjadi dan ditakuti karena

luasnya dampak yang diakibatkan dari kejadian tersebut (Malau, 2017). Tidak hanya itu, bentuk bencana lain adalah kekeringan, banjir, longsor, puting beliung, kebakaran, dan tsunami. Jika dilihat dari jumlahnya, kejadian bencana pada kurun waktu 2017 terdiri dari banjir (737), puting beliung (651), tanah longsor (577), kebakaran hutan dan lahan (96), banjir dan tanah longsor (67), kekeringan (19), gempa bumi (18), gelombang pasang/abrasi (8), serta letusan gunung api (2). Bencana-bencana tersebut kerap kali mengakibatkan korban nyawa dalam jumlah yang tidak sedikit, begitu juga korban material seperti kerusakan rumah, terputusnya jaringan transportasi/komunikasi, dan gangguan kesehatan/jiwa. Dilihat dari jenisnya tersebut, maka dapat dikatakan bahwa dominasi bencana di Indonesia adalah bencana hidrometeorologi, yakni bencana alam yang dipicu oleh curah hujan lebat, deras dan basah sepanjang musim hujan (Suryatmojo, 2017). Bencana meteorologi adalah bencana yang melibatkan parameter-parameter meteorologi, seperti curah hujan, kelembaban, temperatur, dan angin.

Menurut Kepala Pusat dan Informasi Humas BNPB, per Desember 2017 tercatat jumlah bencana alam di Indonesia mencapai 2.271 kejadian dengan jumlah korban meninggal mencapai 372 orang, korban luka-luka sebanyak 969 orang, 44.539 unit rumah rusak, serta korban mengungsi dan menderita sebanyak 3,45 juta orang (KOMPAS.com/Estu Suryowati). Tidak hanya bencana alam, berbagai bencana akibat ulah manusia juga mengakibatkan jatuhnya korban (baik jiwa maupun materi). Hanya saja, data secara pasti mengenai jumlah korban bencana akibat ulah manusia (*human made disaster*) tidak banyak dilaporkan, tentu dengan berbagai alasan.

Berdasarkan data jumlah bencana secara keseluruhan, secara mengejutkan diketahui bahwa perempuan dan anak-anak adalah korban yang terkena dampak paling besar. Kondisi ini tentu sungguh memprihatinkan. Pertanyaan-pertanyaan bermunculan dari berbagai pihak. Apa yang menjadi alasan dari perempuan dan anak-anak sebagai korban potensial pada situasi bencana? Adakah kelemahan peran di masyarakat sebagai faktor utamanya?

Suatu titik terang agaknya dapat menjelaskan sebagian dari fenomena tersebut. Perempuan dan anak-anak adalah kelompok masyarakat yang tergolong ‘kurang’ dalam penguasaan sistem informasi (Rasban, 2018). Pada kesehariannya, perempuan dan anak-anak kurang dilibatkan dalam sosialisasi maupun upaya-upaya pengenalan bencana. Sebagai contoh, pada pertemuan desa (atau rukun warga adat) di Bali, undangan hanya ditujukan kepada para kepala keluarga (yang dalam hal ini adalah laki-laki). Dalam hal ini, secara struktural para perempuan dinilai cukup lemah sehingga peran/upaya penyelamatan dilegitimasi sebagai tanggung jawab laki-laki. Terbatasnya akses perempuan dan anak pada sistem informasi menjadikan mereka target korban dari suatu bencana. Perempuan dan anak tidak diharuskan dan/atau dibiasakan mengikuti latihan-latihan keterampilan tanggap bencana. Dampaknya, pada situasi bencana, perempuan kurang mampu menyelamatkan diri, padahal perempuan berkewajiban menjaga dan

memastikan keamanan dari anak-anak dan kerabat usia lanjut lain di keluarganya (Hastuti, 2016). Sementara itu, keterbatasan akses informasi pada kelompok anak-anak dapat dilihat dari interaksinya dengan lingkungan. Sebagaimana diketahui, anak adalah individu yang belajar dari pengalaman kesehariannya dalam lingkungan. Maka apakah dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa lingkungan masih belum mampu mengenalkan anak pada kondisi bencana secara optimal? Apakah ini mengindikasikan adanya kebutuhan untuk melakukan pengenalan tentang bencana kepada anak secara lebih terintegrasi?

Pasca tsunami Aceh (2004) dan gempa bumi Yogyakarta (2006), pemerintah mulai bersungguh-sungguh merancang suatu sistem pencegahan dan pengelolaan bencana di Indonesia. Sistem tersebut dirancang secara terintegrasi, dengan melibatkan berbagai departemen terkait, termasuk dalam hal ini adalah departemen pendidikan, melalui pendidikan bencana untuk membentuk generasi siaga bencana. Jika dicermati, sistem pendidikan bencana terintegrasi tersebut masih berfokus pada peristiwa dan tindakan penanganan pascabencana, melalui optimalisasi kegiatan penanganan korban bencana. Hal ini tidak serta-merta berarti pemerintah abai atas kegiatan mitigasi bencana (sebelum suatu kejadian berlangsung), namun melalui program penanggulangan risiko bencana ini (atas himbauan Perserikatan Bangsa-bangsa), Pemerintah Indonesia mengimplementasikan model pendidikan bencana ke sekolah-sekolah, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA. Tujuan utama dari ide ini adalah menciptakan langkah pertama dalam mempersiapkan generasi siaga bencana. Geliat siaga bencana dibudayakan sejak masa kanak-kanak sehingga diharapkan kelak mereka menjadi generasi siaga bencana yang tangguh dan berwawasan.

Pendidikan bencana bukanlah suatu hal baru bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, karena sejak tahun 2001, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah telah menginisiasi program ini ke dalam program pendidikannya. Program pendidikan bencana pada dasarnya adalah suatu aktivitas pembelajaran kepada anak didik tentang informasi potensi daerah, kemungkinan bencana dan pengenalan langkah untuk mengurangi risiko bencana. Ini berarti tujuan pendidikan bencana sesungguhnya bukan pada tindakan untuk mengurangi dampak risiko keselamatan, tapi agar bencana berdampak nol. Model pendidikan bencana tersebut dapat berupa pelatihan dan penyuluhan keselamatan darurat bencana, pengenalan dan ekshibisi bencana melalui pemberian informasi yang benar dan tepat. Tujuan pendidikan bencana adalah meningkatkan kewaspadaan bencana (*emergency preparedness*) untuk siswa sehingga memiliki pengetahuan dan keterampilan sederhana untuk menghadapi kemungkinan bencana. Di Indonesia, model pendidikan bencana diimplementasikan ke dalam Sekolah Aman Bencana yang kemudian menjadi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). SPAB adalah langkah taktis pemerintah untuk mewujudkan sekolah aman bencana pada seluruh jenjang pendidikan di Indonesia, termasuk jenjang

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) meliputi Kelompok Bermain dan Taman Kanak-kanak.

Prinsip SPAB salah satunya adalah berpusat pada anak. Ini berarti bahwa anak memiliki posisi penting dalam menyukseskan implementasi kegiatan tersebut yang berlandaskan pada minat dan kebutuhan spesifik. Dalam konteks itu, kebijakan nasional/pemerintah daerah, kemitraan antara sekolah dan lembaga lain, penguatan kerja sama dinas dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat, ketersediaan tenaga pendamping, pengembangan informasi terkait risiko, dan kegiatan kampanye dipilih sebagai indikator keberhasilan SPAB di daerah.

Jika dicermati, SPAB lebih menekankan pada aspek penguatan kelembagaan/institusi daripada memperkuat aspek kognitif anak didik dengan pengetahuan yang dimiliki. Kami melihat bahwa model pendidikan bencana itu dalam kenyataannya tidak dipahami secara menyeluruh baik dari aspek kognitif maupun manajerial, terlebih pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD). Kami berpendapat bahwa kurikulum pendidikan bencana sebagai hal terpenting, yang merupakan inti dalam pembelajaran generasi tanggap bencana, justru menjadi terabaikan dalam implementasi Satuan Pendidikan Aman Bencana, baik pada tingkat nasional dan daerah. Menurut pandangan kami, dengan menekankan pada aspek kurikulum maka implementasi SPAB pada tingkat daerah untuk mendorong pendidikan tangguh bencana akan dapat dicapai. Oleh karena itu, dengan mengambil studi kasus pada beberapa TK di Bali, pada artikel ini akan dipaparkan sejauh mana kurikulum pendidikan bencana tersebut diimplementasikan di jenjang pendidikan anak usia dini yang ada di Bali.

METODE

Tujuan penelitian ini adalah menilai implementasi kurikulum pendidikan bencana pada jenjang pendidikan anak usia dini, dalam hal ini adalah Taman Kanak-kanak yang ada di Bali. Bali, yang dikenal sebagai daerah pariwisata, merupakan salah satu daerah yang menyimpan potensi bencana di Indonesia. Bencana alam yang terjadi sebagian besar didominasi oleh banjir, tanah longsor, kekeringan, puting beliung, dan letusan gunung berapi (Gunung Agung). Meskipun jumlah korban jiwa relatif tidak banyak, dampak yang ditimbulkan secara material cukup mengkhawatirkan. Misalnya pada tahun 2017, Pusdalops BPBD Provinsi Bali menyebutkan bahwa akibat erupsi letusan Gunung Agung, 43.358 orang diungsikan ke pos-pos pengungsian terdekat untuk meminimalkan korban bencana (http://tribunnews.com). Pada fase pengungsian ini, kegiatan keseharian pengungsi (seperti pertanian, peternakan, ekonomi/perdagangan, pariwisata, dan pendidikan), menjadi terganggu selama kurang lebih 3 bulan. Beberapa bencana lain seperti tanah longsor dan banjir juga mengancam pada saat musim hujan tiba, khususnya di daerah Kabupaten Bangli, Buleleng, dan Badung. Ketiga kabupaten tersebut dianggap memiliki tingkat kerawanan bencana yang

tinggi di Bali. Tiga kabupaten tersebut memiliki karakteristik wilayah yang mewakili bencana-bencana puting beliung, banjir, dan letusan gunung berapi.

Penelitian ini dilakukan di beberapa taman kanak-kanak (TK) yang ada di ketiga kabupaten tersebut. Pemilihan lokasi TK disesuaikan dengan informasi awal dari BPBD mengenai potensi bencana di lokasi-lokasi tersebut. Terdapat 6 TK yang dijadikan sebagai situs penelitian, dengan masing-masing 2 TK di setiap kabupaten. Studi ini dilakukan selama 6 bulan (November 2017 sampai dengan April 2018). Desain penelitian ini menggunakan studi kasus dengan memfokuskan analisis pada kurikulum yang digunakan di masing-masing TK. Dalam pelaksanaannya, kami melakukan observasi terhadap aktivitas kelas yang diikuti wawancara terhadap pada guru dan kepala TK. Analisis dilakukan terhadap isi kurikulum sekolah, rencana pembelajaran di kelas, media pembelajaran, implementasi (kesesuaian materi dan proses), dan evaluasinya. Pada penelitian ini, kami mengadaptasi secara sederhana model evaluasi CIPP dengan penyesuaian pada konteks lapang pembelajaran. Dalam hal ini, kerangka berpikir SPAB kami jadikan sebagai acuan proyek atau kebijakan yang dianalisis secara makro. Hal itu memudahkan untuk mencari jawaban atas kebutuhan pendidikan rawan bencana yang telah digagas oleh pemerintah pada level pendidikan anak usia dini.

HASIL

Hasil studi ini dipaparkan dalam dua subbagian. Subbagian pertama memotret tentang kurikulum sekolah dan gambaran proses pembelajaran di TK obyek penelitian. Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti diuraikan dalam bentuk uraian data per kabupaten. Kedua, secara khusus pemetaan kurikulum dilakukan dengan mengklasifikasikan hasil penelitian ke dalam model CIPP secara sederhana. Hasil secara umum pada jenjang kabupaten menunjukkan bahwa tidak ada lembaga PAUD yang memiliki kurikulum secara spesifik yang membahas mengenai bencana. Temuan ini cukup mengejutkan, bahwa kenyataannya Satuan Pendidikan Aman Bencana tidak berjalan di Bali, secara khusus di tiga kabupaten sebagai fokus penelitian ini.

Gambaran proses pembelajaran tentang bencana cukup bervariasi antara lokasi penelitian satu dengan lainnya. Namun demikian, ada kesamaan dari semua lokasi penelitian, yakni acuan dalam menyusun kurikulum atau program sekolah menggunakan Permendikbud RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Pada lokasi penelitian di Kabupaten Buleleng, materi bencana tidak dirancang secara khusus. Guru dan kepala TK bahkan tidak mengetahui tentang adanya peraturan pemerintah mengenai persiapan generasi siaga bencana yang dicanangkan sejak usia dini. Program sekolah tidak menjabarkan target tentang kemampuan tanggap bencana untuk anak. Materi yang terkait bencana alam dialokasikan pada tema alam semesta atau lingkunganku. Implementasi umumnya

dilaksanakan 1 hari, pada kurun waktu tema pembelajaran tersebut. Oleh karena tidak dirancang pada program, maka materi mengenai bencana tidak selalu diajarkan di kelas. Terkadang, pembahasan mengenai bencana alam ini luput dari perhatian guru, sebab yang menjadi fokus belajar pada tema-tema tersebut adalah tentang kondisi alam semesta yang berdampak positif pada manusia. Jika melihat pada proses di kelas, salah satu pendidik telah memiliki media yang cukup menarik minat belajar anak-anak. Media ini digunakan dalam serangkaian simulasi mengenai tsunami. Perlu diketahui, lokasi penelitian memang berada di pinggir pantai utara Pulau Bali. Media ini awalnya dibuat pasca kejadian tsunami di Aceh tahun 2004 silam. Media untuk simulasi berkelompok ini digunakan secara bergiliran oleh para siswa.

Di Kabupaten Buleleng, kompetensi anak didik siaga bencana juga tidak ditargetkan secara khusus pada kurikulum sekolah di kedua TK lokasi penelitian. Sebagaimana di Kabupaten Buleleng, guru menyelipkan mengenai bencana pada tema-tema alam dan lingkungan. Implementasinya juga secara insidental, sebagai salah satu lokasi penelitian yang membahas mengenai bencana selama 1 minggu pembelajaran, yakni ketika daerahnya mengalami banjir saat musim penghujan. Pihak sekolah memberikan materi dengan bercerita dan menggunakan media buku bergambar, serta simulasi menghindar dan menyelamatkan diri dari banjir. Oleh karena tidak terencana, maka pelaporan, evaluasi, dan tindak lanjut pembelajaran pun tidak dilakukan oleh guru.

Pada lokasi terakhir, yakni di Kabupaten Karangasem, intensitas pembelajaran dengan materi tanggap bencana dilaksanakan secara lebih intens, terutama pasca kejadian erupsi kabut asap dari Gunung Agung tahun 2017. Serupa dengan di Kabupaten Badung, lokasi ini juga menerapkan pembelajaran sesuai konteks lingkungan sekitar. Guru memfokuskan target belajar tentang upaya-upaya penyelamatan diri melalui metode sosiodrama dipadukan dengan bermain peran. Target yang diharapkan adalah agar anak-anak didik ini memiliki kemungkinan minimal untuk menjadi korban erupsi Gunung Agung. Beberapa sarana keselamatan yang disumbangkan oleh lembaga-lembaga asing diakui sangat membantu dalam pembelajaran tersebut. Namun sungguh disayangkan, sebagaimana di 2 kabupaten lainnya, target generasi siaga bencana ini pun tidak dituangkan secara tertulis pada kurikulum TK. Padahal, lokasi TK di Desa Muncan ini sangat dekat (±10km) dengan Gunung Agung sebagai gunung berapi aktif di Provinsi Bali.

Analisis secara sederhana menggunakan model CIPP kami lakukan untuk memetakan berbagai kelemahan dalam pendidikan anak usia dini, khususnya di Bali yang terkait dengan target generasi siaga bencana. Kami menganalisis kurikulum milik TK yang digunakan oleh guru-guru sebagai pedoman pembelajaran di lembaganya masing-masing. Hasil temuan pada aspek kurikulum menunjukkan bahwa ada empat kompetensi inti yang ditargetkan dalam pembelajaran di PAUD. Keempat kompetensi

itu adalah sikap spiritual (K1), sikap sosial (K2), pengetahuan (K3), dan keterampilan (K4). Sikap spiritual menekankan pada aspek penerimaan ajaran agama yang dianut oleh anak didik. Sikap sosial menekankan pada perilaku hidup sehat, rasa ingin tahu, kreatif dan estetik, percaya diri, disiplin, peduli, mampu menghargai dan toleran terhadap orang lain, mampu menyesuaikan diri, tanggung jawab, jujur, rendah hati, dan santun dalam berinteraksi. Pengetahuan meliputi mengenali diri, keluarga, teman, pendidik, lingkungan, agama, teknologi, seni, dan budaya. Terakhir, kompetensi keterampilan yang ditargetkan adalah kemampuan anak didik untuk menunjukkan hal-hal yang diketahui, dirasakan, dibutuhkan, dan dipikirkan melalui bahasa, musik, gerakan, dan karya produktif.

Dari kompetensi-kompetensi inti tersebut, pada K2 dan K3 ada ruang bagi guru untuk menyampaikan materi mengenai kebencanaan. Beberapa kompetensi dasar yang seharusnya dapat digunakan sebagai wadahnya adalah (i) memiliki perilaku mencerminkan sikap peduli, mau membantu jika diminta dan (ii) mengenal lingkungan alam (hewan, tanaman, cuaca, tanah, air dan lainnya). Sebagai contoh, pada situasi banjir, para guru mengajarkan sikap peduli dengan cara memberikan bantuan pada korban dan menyelamatkan teman serta keluarga dengan mengakses mengenai informasi bencana. Guru akan bertanya kepada anak didik apa tindakan siswa jika menemukan kondisi tersebut. Kompetensi dasar kedua yaitu pengenalan lingkungan alam, para murid diperkenalkan karakteristik alam sekitar, termasuk pula bencana-bencana yang potensial terjadi di sekitar tempat tinggalnya. Walaupun memang sangat minim, namun pokok-pokok materi tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal oleh guru dalam mengenalkan dan menjadikan anak didik usia dini siaga terhadap bencana yang berpotensi terjadi di lingkungan mereka masing-masing. Guru belum menyadari akan kebutuhan penting ini di lapangan.

Hasil penelitian awal ini menunjukkan bahwa konsep pendidikan tangguh bencana, yang dituangkan ke dalam model Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), memang belum diterapkan pada jenjang pendidikan anak usia dini. Hal tersebut tercermin dari tidak adanya materi bencana yang dicantumkan atau ditargetkan secara spesifik pada kurikulum sekolah. Kondisi itu menyebabkan guru tidak konsisten dalam memperkenalkan isu bencana bagi anak didiknya. Lemahnya improvisasi dan kurangnya keberanian guru dalam adaptasi kurikulum juga menjadi salah satu hambatan untuk mendukung kebijakan pemerintah mewujudkan pendidikan tangguh bencana, terutama di jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD).

PEMBAHASAN

Pada dasarnya, temuan penelitian lapangan memberikan gambaran bahwa materi dan kurikulum bencana belum diimplementasikan pada jenjang PAUD. Kami menggunakan model evaluasi CIPP untuk menganalisis temuan lapangan. Model

tersebut memberikan kami kesempatan untuk memperlakukan SPAB sebagai suatu proyek (*input*). SPAB adalah komitmen kuat yang dibuat oleh pemerintah Indonesia sebagai respons atas kebutuhan komunitas (masyarakat) dan kebutuhan pembelajaran. Untuk itu, komponen CIPP digunakan sebagai panduan analisisnya. Kami akan meletakkan pembahasan pada tiga hal yaitu faktor kebijakan pemerintah (*political will*), pendidikan bencana di sekolah PAUD (materi, implementasi, peran guru dalam pendidikan bencana), dan peran orang tua atau lembaga-lembaga lokal yang ada.

Pertama, jika dilihat secara umum, pemerintah telah menetapkan model pendidikan tangguh bencana bagi semua jenjang pendidikan di Indonesia, mulai dari PAUD sampai dengan SMA, yang dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional No. 70a/SE/MPN/2010 (Kementerian Pendidikan Nasional, 2010). Ini berarti anak-anak berusia di bawah 18 tahun berhak mendapatkan pendidikan bencana melalui institusi sosial resmi yang bernama sekolah. Surat edaran tersebut telah dikirim ke sekolah-sekolah dengan tembusan kepala dinas masing-masing provinsi dan kabupaten. Surat edaran ini menarik karena ada tiga opsi yang diperbolehkan oleh pemerintah dalam penyampaian materi risiko bencana yaitu pada mata pelajaran, muatan lokal, dan kegiatan ekstrakurikuler. Model pendidikan itu diterjemahkan ke dalam Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) yang disepakati oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB). BNPB menyikapi kebijakan tersebut dengan membuat panduan tentang sekolah aman.

Jadi, kedua lembaga tersebut memiliki pemahaman yang sama untuk mewujudkan generasi tangguh bencana pada semua jenjang pendidikan. Ini berarti model tersebut harus masuk dalam setiap kurikulum sekolah. Hanya saja, kebijakan pemerintah secara nasional tentang penanggulangan risiko terhadap anak dimulai pada kurikulum kelas 4 sekolah dasar (Amri, Bird, Ronan, Haynes, & Towers, 2017). Ini berarti model pendidikan ini belum diterapkan secara maksimal di sekolah-sekolah, baik dari sisi materi maupun implementasi proses pembelajarannya. Kami menyadari bahwa kebijakan pemerintah menempatkan konsep pendidikan pengurangan risiko bencana di tingkat 4 sebagai hal yang kurang tepat. Meskipun dalam praktiknya pemerintah tidak membatasi materi pendidikan ini diterapkan pada tingkat mana saja, namun ketiadaan kurikulum di tingkat anak usia dini atau anak-anak kelas 3 ke bawah cukup berisiko ke depannya.

Untuk menyiasati hal itu, ada hal yang dapat dilakukan oleh dinas-dinas pendidikan di tingkat daerah, yaitu dengan memaksimalkan konten atau muatan lokal dan kegiatan ekstrakurikuler. Selama ini, muatan lokal hanya diisi oleh materi-materi sosial budaya yang ada di lingkungan sekitar mereka, sedangkan materi kegiatan ekstrakurikuler banyak mengadopsi materi-materi nasional. Situasi ini menunjukkan bahwa pada skala kebijakan tingkat daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota belum mampu untuk meratifikasi kebijakan nasional mengenai kurikulum pendidikan

pengurangan risiko bencana ke dalam muatan lokal mereka. Dengan kata lain, belum ada kejelasan kebijakan pendidikan bencana secara nasional kepada para pelaku pendidikan di tingkat daerah, baik dinas pendidikan kabupaten/kota, sekolah, dan para guru.

Kedua, faktor pendidikan bencana di sekolah-sekolah Indonesia cenderung tidak siap. Temuan kami di lapangan menunjukkan bahwa tidak ada lembaga pendidikan anak usia dini yang memiliki kurikulum tentang bencana, baik sebagai bagian dari mata pelajaran, muatan lokal, maupun kegiatan ekstrakurikuler. Komponen pendidikan bencana di sekolah dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu materi, implementasi, dan partisipan pendidikan (guru dan siswa). Merujuk pada temuan di lapangan, PAUD yang menjadi objek penelitian menyatakan bahwa mereka tidak memiliki materi yang "siap" dan "ramah" terhadap anak didik. Para guru merasa bahwa kesulitan utama mereka dalam memberikan pengajaran mengenai pendidikan bencana ialah karena sulit mengakses materi. Ketiadaan akses bagi para pendidik terhadap materi-materi kebencanaan menjadi permasalahan utama yang dapat diidentifikasi. Di sisi lain, Pusat Kurikulum Nasional di Jakarta belum juga mengeluarkan modul pelatihan kebencanaan yang diintegrasikan ke dalam kurikulum anak usia dini dan hanya berfokus untuk anak SD ke atas (lihat Pusat Kurikulum, 2009). Sebenarnya materi yang ada untuk anak-anak SD tersebut dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan untuk anak-anak usia dini. Misalnya, lima kategori ancaman bencana seperti gempa bumi, banjir, longsor, kebakaran, dan tsunami dapat diadopsi. Sedangkan bagi daerah-daerah yang dekat dengan gunung berapi, pengetahuan mengenai letusan gunung berapi dapat dijadikan materi tambahan.

Telah jelas bahwa keberadaan materi siaga bencana sesungguhnya adalah kebutuhan mendasar dari sekolah-sekolah untuk merespons berbagai kondisi bencana di Indonesia. Kebutuhan komunitas akan generasi yang tangguh bencana menjadi salah satu dasar penting bagi kehadiran proyek ini di Indonesia. Generasi tangguh bencana dapat dipahami sebagai tujuan utama yang mendorong munculnya kebutuhan lain dalam pembelajaran di lembaga pendidikan. Kebutuhan-kebutuhan ini diartikulasikan ke dalam SPAB. Namun, sepanjang penelusuran yang kami lakukan pada aturan SPAB, muatan kurikulum memang tidak diformulasikan secara detail. Misalnya, tujuan SPAB lebih menitikberatkan pada koordinasi kelembagaan di tingkat nasional dan daerah. Dalam hal ini materi tidak menjadi fokus yang harus dibahas sehingga berdampak pada lemahnya pemetaan khalayak/sasaran yang dituju, sumber daya yang ada (guru dan materi), dan yang terpenting, strategi yang dipilih untuk mengenalkan materi siaga bencana.

Materi siaga bencana seharusnya adalah bagian terpenting dari SPAB karena hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari kemampuan, potensi, dan ketangguhan kebijakan. Dari awal, SPAB hadir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat. Namun, dalam

prosesnya, di samping tidak menghadirkan substansi berupa kurikulum, SPAB ternyata lebih menekankan pada aspek-aspek teknis kelembagaan seperti koordinasi dinas pendidikan dan BPBD, sistem keuangan, strategi kampanye, dan riset. Jika belajar dari Jepang sebagai salah satu contoh negara tanggap bencana yang baik, dapat dilihat bahwa ketika yang diharapkan adalah generasi tanggap gempa bumi, maka materi tentang bencana gempa bumi disertakan dalam proses pendidikan. Jepang memilih menggunakan pendekatan umum, menyasar pada budaya keselamatan terhadap gempa bumi di kalangan generasi muda. Pendekatan yang dipilih untuk membangun sekolah tahan gempa adalah dengan menyertakan materi bencana gempa bumi tersebut ke dalam kurikulum sekolah (UNCRD dalam Adiyoso & Kanegae, 2013).

Kurikulum sekolah adalah landasan dalam menciptakan dan memelihara budaya keselamatan di sekolah tersebut. Budaya keselamatan yang diciptakan dan dipelihara di sekolah tentu akan diimplementasikan dan diperluas oleh para anak didik ke lingkungan sekitar mereka. Jadi, selain sebagai generasi tanggap bencana gempa bumi, siswa sekaligus berperan sebagai agen dalam kampanye budaya keselamatan terhadap bahaya gempa bumi bagi masyarakat. Maka, jika Pemerintah Indonesia hendak memiliki generasi tanggap bencana sejak dini, materi bencana tersebut seharusnya menjadi bagian penting yang disertakan pada kurikulum sekolah anak usia dini. Tidak hanya di pusat, gerakan ini tentu juga harus dilaksanakan di daerah-daerah, terutama daerah yang berpotensi terkena dampak bencana tersebut.

Di Bali, pemerintah yang membawahi elemen pendidikan anak usia dini tentu mulai menyadari kelemahan-kelemahan lembaga pendidikan dalam mempersiapkan generasi tanggap terhadap bencana. Pada kasus di PAUD, di samping kebijakan dan sosialisasi bencana masih rendah, penentuan kurikulum yang terlalu kaku juga menjadi alasan dari lemahnya pendidikan bencana kontekstual bagi anak didik. Dalam pengamatan kami, lembaga-lembaga PAUD masih dibatasi improvisasinya dalam membuat kurikulum maupun program sekolah. Materi maupun kegiatan tidak lagi didasarkan pada kebutuhan lingkungan sekitar (kontekstual), sebagaimana pembelajaran yang seharusnya diperoleh anak usia dini (Semiawan, 2008). Belajar bagi anak usia dini adalah upaya memahami lingkungan, sehingga materi dan kegiatan yang kontekstual merupakan kebutuhan dari siswa. Ini tentu menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar bagi dinas pendidikan, terutama dalam proses penilaian atau akreditasi lembaga. Bila selama ini hanya dititikberatkan pada *template* pelaporan saja, dinas pendidikan perlu mengevaluasi target yang lebih besar, yakni pencapaian kemampuan anak usia dini yang berkembang secara utuh, melalui kegiatan belajar PAUD yang holistik dan terintegrasi, kontekstual terhadap lingkungan anak masing-masing.

Dari temuan lapangan, khususnya untuk para guru, ketidakberanian guru dalam berinisiatif dalam proses pembelajaran menjadi catatan penting. Guru-guru cenderung pasif mencari sumber pengetahuan baru dari sumber-sumber lain seperti pelatihan atau

materi di luar kebijakan pemerintah. Guru-guru terpaku pada kurikulum yang sudah ditentukan oleh dinas masing-masing kabupaten. Salah satu alasan yang dipakai guru adalah keengganan mereka mendapatkan teguran dari penilik sekolah. Standar yang diterapkan oleh dinas pendidikan di masing-masing kabupaten mereka anggap sudah tepat dan fungsi guru hanya sebagai penyampai pesan (*mediator*) dan bukan fasilitator. Beberapa guru merasa bahwa ada keinginan untuk menyampaikan materi tentang bencana, tetapi mereka ragu dengan materi yang ada dan cara penyampaiannya. Proses pengintegrasian kurikulum bencana di sekolah-sekolah PAUD di Bali menjadi terhambat akibat lemahnya inisiatif para guru. Jika dibandingkan dengan hal yang sama di Aceh misalnya, hasilnya kurang lebih sama. Guru belum memahami sepenuhnya jenis-jenis bencana. Guru-guru tidak memiliki kapasitas dalam pemberian materi bencana. Kurikulum dan pengayaannya tidak dipahami secara mendasar dan ini menjadikan guru hanya sebagai pelaksana. Dokumen penunjang juga tidak memadai dalam proses pembelajaran (Fanany, Washington, Earthscan, & Husein, 2010; Khairuddin & Niswanto, 2014). Jadi, berdasarkan komponen kapasitas guru, ada kebutuhan mendesak dari para guru untuk mendapatkan pelatihan dalam pengembangan dan pemberian materi kebencanaan serta ada ketertinggalan pengetahuan mengenai kebencanaan pada pendidikan bencana tersebut.

Pada tingkat partisipasi, partisipasi siswa berusia dini selama ini dikesampingkan karena dianggap sebagai individu yang lemah dan cenderung tidak mampu untuk mengambil keputusan (Freeman, Nairn, & Gollop, 2015; King & Tarrant, 2013). Tapi, sebagaimana diingatkan oleh King & Tarrant (2013) lebih lanjut, pada usia anak-anak kemampuan kognitif sedang berkembang, maka pengenalan tentang materi bencana menjadi hal yang penting dan berkontribusi positif. Selama ini proses pendidikan di Indonesia yang cenderung “top-down” menghasilkan karakter anak yang kurang berani mengambil inisiatif (Amri et al., 2017). Ada anggapan yang masih banyak dijumpai bahwa anak-anak sebenarnya tidak perlu dilibatkan dalam proses perencanaan mengenai kebencanaan. Ini menjadi persoalan serius dari kesalahan interpretasi mengenai apa yang disebut dengan partisipasi aktif tersebut. Padahal, kami yakin bahwa anak-anak memiliki suatu ketertarikan dan rasa ingin tahu yang tinggi mengenai materi baru terkait dengan bencana. Padahal jika diamati secara serius, kebanyakan dari anak-anak usia dini ini memiliki risiko yang paling tinggi terkena bencana. Komponen ini sering diabaikan dalam sistem pendidikan anak usia dini di Indonesia.

Pada jenjang PAUD, materi-materi bencana yang akan ditransfer ke anak tentu disesuaikan dengan kemampuan kognitif-afektif-konatif anak usia dini sebagai peserta didiknya. Dalam hal ini, guru wajib memiliki pemahaman menyeluruh mengenai materi-materi tersebut, untuk selanjutnya dapat dipetakan ke dalam konsep-konsep sederhana pada tahap perencanaan pembelajaran (baik tahunan, semester, bulanan/tema,

maupun harian). Pada tahap perencanaan, ditentukan target-target pencapaian belajar anak didik usia dini pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Pada ranah kognitif, anak diharapkan mengenali dan memiliki pemahaman mengenai bencana, terutama jenis bencana yang sesuai karakteristik daerah masing-masing, mengenali pusat-pusat penyelamatan, dan mengetahui prosedur penyelamatan diri. Pada ranah afektif, pengembangan anak usia dini menyasar pada kemampuan dalam manajemen rasa takut-cemas-sedih-marah, kepercayaan diri, penerimaan atas suatu keadaan bahaya, serta empati dan kasih sayang. Pada ranah psikomotor, anak usia dini perlu mendapatkan pengalaman dalam bertindak tepat terhadap situasi, baik dalam pencegahan bencana maupun dalam upaya penyelamatan diri saat bencana terjadi.

Ketiga, keberadaan dan koordinasi lembaga luar seperti orang tua dan *stakeholders* (lembaga-lembaga lokal) masih lemah. Sekolah-sekolah Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten yang ada di Bali tidak pernah melakukan kerja sama dengan lembaga manajemen bencana di tingkat kabupaten seperti BPBD. Lembaga-lembaga sosial seperti desa adat sebenarnya dapat mengambil peran inisiatif kelembagaan. Harus ada semacam ruang yang diciptakan dalam proses pembelajaran mengenai pengurangan risiko bencana ini dengan melibatkan institusi sosial di luar sekolah, seperti orang tua dan lembaga yang menangani bencana. Para guru dan lembaga-lembaga tersebut dapat mengadakan aktivitas bersama seperti penyiapan kurikulum untuk pendidikan anak usia dini yang spesifik dengan bencana di lokasi mereka, membuat rencana simulasi bencana, dan meningkatkan pengetahuan tanggap bencana untuk sekolah dan komunitas.

SIMPULAN

Tujuan pendidikan bencana bukanlah pada tindakan untuk mengurangi dampak saja, namun agar bencana itu sendiri berdampak nol terhadap keselamatan manusia. Sesuai target tersebut, materi-materi dalam pendidikan bencana tidak hanya mengarah pada upaya menyelamatkan diri saat bencana, namun juga upaya-upaya pencegahan bencana itu sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa materi siaga bencana belum diimplementasikan secara maksimal ke dalam proses pembelajaran di jenjang PAUD. Regulasi yang timpang, media pembelajaran yang terbatas (baik ketersediaan maupun aksesnya), dan rendahnya pemahaman guru-guru PAUD mengenai karakteristik bencana di daerahnya masing-masing menjadikan minimnya pembelajaran bencana yang mampu dihadirkan di kelas secara kontekstual. Dampaknya, anak usia dini memiliki pengalaman belajar tentang bencana yang sangat minim, yang tentu akan berdampak negatif pada kesiapsiagaan dan kemampuan anak untuk bereaksi secara tepat pada situasi bencana. Psikologi akan sangat berperan, terutama pada pengembangan ranah afeksi, demi mewujudkan generasi tanggap bencana sejak usia dini.

PUSTAKA ACUAN

Adiyoso, W. & Kanegae, H. (2013). Efektifitas dampak penerapan pendidikan kebencanaan di sekolah terhadap kesiapsiagaan siswa menghadapi bencana tsunami di Aceh, Indonesia. Majalah Perencanaan Pembangunan, Edisi 03/Tahun XIX/2013, p. 31-44. Dapat dibuka pada https://www.bappenas.go.id/files/majalah_perencanaan

Amri, A., Bird, D. K., Ronan, K., Haynes, K., & Towers, B. (2017). Disaster risk reduction education in Indonesia: challenges and recommendations for scaling up. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, *17*(4), 595–612. https://doi.org/10.5194/nhess-17-595-2017

Fanany, I., Washington, S. K., Earthscan, D. C., & Husein, R. A. M. A. (2010). Post-disaster reconstruction: Lessons from Aceh, 87–90.

Freeman, C., Nairn, K., & Gollop, M. (2015). Disaster impact and recovery: What children and young people can tell us. *Kōtuitui: New Zealand Journal of Social Sciences Online*, *10*(2), 103–115. https://doi.org/10.1080/1177083X.2015.1066400

Kementerian Pendidikan Nasional. (2010). *Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di sekolah, Surat Edaran Menteri No. 70a/SE/MPN/2010*. Jakarta: Kemententerian Pendidikan Nasional RI.

Khairuddin, & Niswanto. (2014). Pengintegrasian pengetahuan kebencanaan ke dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di SD Sekota Banda Aceh. *Jurnal Tabularasa PPS Unimed*, *11*(1), 29–49.

King, T. A., & Tarrant, R. A. C. (2013). Children's knowledge, cognitions and emotions surrounding natural disasters: An investigation of Year 5 students, Wellington, New Zealand. *Australasian Journal of Disaster and Trauma Studies*, *1*, 17–26.

Malau, S. (2017). *Akibat Erupsi Gunung Agung, 43.358 Orang Mengungsi di 229 Titik Lokasi Pengungsian.* Diunduh pada http://www.tribunnews.com/nasional/2017/11/30/akibat-erupsi-gunung-agung-43358-orang-mengungsi-di-229-titik-lokasi-pengungsian

Pusat Kurikulum. (2009). *Modul pelatihan pengintegrasian pengurangan risiko bencana ke dalam sistem pendidikan: Jenjang pendidikan dasar dan menengah*. Jakarta: Pusat Kurikulum, SCDR & UNDP.

Putri, A. D. (2017). Pentingnya pendidikan untuk penanggulangan dan darurat Bencana. Dapat diunduh pada https://nasional.kompas.com/read/2017/12/18/17034841/pentingnya-pendidikan-untuk-penanggulangan-dan-darurat-bencana.

Rasban, S. (2018). *Anak-anak dan perempuan selalu jadi korban bencana.* Diunduh pada http://mediaindonesia.com/read/detail/148677-anak-anak-dan-perempuan-selalu-jadi-korban-bencana

Rustam, W. (2015). Perempuan adalah Korban Terbesar dari Berbagai Bencana yang Terjadi. *Jurnal Perempuan*, 15 September 2015.

Ronan, K. R., & Johnston, D. (2015). *Promoting community resilience in disasters: The role for schools, youth and families*. New York: Springer.

Semiawan, C. R. (2008). *Belajar dan Pembelajaran Prasekolah dan Sekolah Dasar*. Jakarta: Indeks.

Suryatmojo, H. (2017). *Bencana hidrometeorologi, apa itu?* Diunduh pada http://konservasidas.fkt.ugm.ac.id/2017/03/23/bencana-hidrometeorologi-apa-itu/

Suryowati, Esti (2017). "*BNPB Mencatat Ada 2.271 Bencana Alam Sepanjang 2017*". Diunduh pada https://nasional.kompas.com/read/2017/12/21/17505651/bnpb-mencatat- ada-2271-bencana-alam-sepanjang-2017.